

Hukum Laut (Law of the Sea)

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Laut (Law of the Sea)
2. Kode MK/SKS/Sifat : TGD363/2 SKS/Pilihan
3. Prasyarat : Pengantar Ilmu Hukum
4. Deskripsi singkat: hukum laut yang rinciannya disesuaikan dengan disiplin geodesi-gematika, pengantar hukum laut, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS), aspek geodesi dan aspek teknis hukum laut dan delimitasi batas laut internasional, sengketa batas dan penyelesaiannya..
5. Tujuan Pembelajaran : Memahami konsep dan sejarah hukum laut, lingkup hukum laut, konvensi PBB tentang hukum laut, aspek geodesi dan aspek teknis hukum laut, keterkaitan antara hukum laut dengan delimitasi batas laut
6. Dosen: Endang Purwaningsih (EPU) dan I Made Andi Arsana (AAR)
7. Silabi (jadual dapat berubah sesuai kondisi dan kesepakatan *team teaching*)

Minggu	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Dosen
1	Pendahuluan	a. Pengertian hukum b. Hukum nasional dan internasional c. Konteks maritim dan hukum laut d. Perairan e. Tantangan pengelolaan maritim	EPU
2	Hukum Laut Nasional	a. Konsep Negara Kepulauan b. Garis pangkal kepulauan Indonesia Alur Laut Kepulauan Indonesia c. Status terkini Klaim Indonesia d. Hukum maritim domestik (Ordenansi lingkungan pantai dan laut wilayah 1939; Deklarasi Djuanda 1957, UU No. 1/1973 (Landas Kontinen Indonesia); UU No 5/1983 (ZEE Indonesia); UU No 17/1985 (ratifikasi LOSC)	AAR
3	Hukum Laut Internasional	a. Evolusi hukum laut b. Hak Negara pantai dan kebebasan laut c. Usaha kodifikasi d. <i>The United Nations Convention on the Law of the Sea (LOSC)</i>	EPU
4	Perkembangan UNCLOS	a. UNCLOS I (1958) b. UNCLOS II (1960) c. UNCLOS III (1973-1982)	EPU
5,6	UNCLOS III	a. Sekilas tentang hukum laut PBB ke 3 b. Masalah perikanan, pencemaran, delimitas batas.	EPU
7,8	Ujian Tengah Semester		Team
9	TALOS	Pembahasan secara rinci tentang TALOS yang diterbitkan oleh IHO tahun 2006	AAR
10	GALOS	a. Sejarah kelompok GALOS b. Tugas Kelompok GALOS	AAR

		c. Sumbangan dan Peran geodesi dalam hukum laut internasional d. Aspek geodesi	
11, 12	Zona Maritime	a. Internal Waters b. Territorial Sea c. Archipelagic Waters d. Contiguous Zone e. Exclusive Economic Zone f. Continental Shelf g. <i>Extended Continental Shelf</i> h. zona internasional	EPU
13	Penentuan Batas Laut	a. tujuan delimitasi b. Prinsip delimitasi Konvensi PBB1958 and 1982 c. Prinsip lain dari International Court of Justice badan peradilan lain d. Pertimbangan yang relevant dan tidak relevan e. Metode dalam proses delimitasi batas laut f. Pengertian dan peran pulau – Pasal 121 LOSC, <i>State practice, case law</i> g. Aplikasi teknis penentuan batas laut h. Penggunaan Teknologi geomatika dalam penentuan batas laut	AAR
14	Sengketa Batas Laut Internasional dan Penyelesaiannya	a. Penyebab sengketa: b. Penyelesaian sengketa c. Studi kasus	AAR/EPU

8. Daftar Pustaka :

1. Arsana, I M. A. (2007) Batas Maritim Antarnegara – Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia
2. Carleton, C. and Schofield, C. (2001). Development in the Technical Determination of Maritime Space: Charts, Datum, Baselines and Maritime Zones, Maritime Briefing, Vol. 3 No. 3, International Boundary Research Unit, Durham, United Kingdom.
3. Carleton, C. and Schofield, C. (2002). Developments in the Technical Determination of Maritime Space: Delimitation, Dispute Resolution, Geographical Information Systems and the Role of the Technical Expert, Maritime Briefing, Vol. 3 No.4, International Boundaries Research Unit, Durham, United Kingdom.
4. Churchill, R. and Lowe, A. (1999). The Law of the Sea, Manchester University Press
5. Djunarsah, E. (2000). Catatan Kuliah Hukum Laut, Penerbit ITB, Bandung
6. Prescott, V. and Schofield, C. (2005). The Maritime Political Boundaries of the World, Second Edition, Martinus Nijhoff Publishers
7. Sjawie, Hasbullah F. (2001). Negara Kepulauan Indonesia dan Hukum Laut Internasional, PT Serambi Ilmu Swasta, Jakarta.